JURNAL

ISSN 2303 - 0313

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akuntansi & Bisnis | Volume XVI No. II Desember 2024

ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

Oleh ;
Hilda Elawati Lasi,Desy Faulina Pakpahan, Adriana D. Silubun

PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PEMANTAUAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN DI BIDANG SUNGAI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Oleh ;
Enggar Trijunanto,Ignatius Ari,Samuel Kombonggai

KEMAJUAN TIK, DIGITASLISASI MEMBUKA JALAN BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Oleh ;
Mubasyier Fatah (basyier.fatah@gmail.com), Yohanes Ngamal, Eka Setiawati

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) MERAUKE

Oleh
Eka Setiawati, Juventus Bangkit Wibowo ,Carine Helda Saharia Junaidi

ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) USAHA JASA PELABUHAN MERAUKE

Oleh;
Ervina Dewi, Eveline Mary, Klaudius Jipicemen

PENGARUH KREDIT MACET DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN PADA BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA (KCU) MERAUKE

Oleh;
Arief Nurtjahjo,Metodius France Janggur, Salerus Kamogou

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@santtheresa.ac.id

ISSN 2303 - 0313

JURNAL

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi bisnis dan konten jurnal ini hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan Jadwal penerbitan dua kali dalam setahun yakni pada Juli dan Desember.

Pelindung	: Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa
Penanggung jawab	: Yohanes Ngamal,SE.,M.Si
Dewan Redaksi	:
Ketua	: Dr. Ir. Arief Nurtjahjo, MH.,M.M
Wakil ketua	: Inez Cara. Alexander. Phoek, B Com.,M.M.,Ph.D
Anggota	: Dra. Eka Setiawati.,M.Si
	Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:
Jl. Nusa Barong. No.1 Merauke, Papua Selatan Tel.(0971)3333501
Email: stie@saintttheresa.ac.id

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa indonesia dan inggris karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat stie@saintttheresa.ac.id Dewan redaksi mengedit dan menyuting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirimkan penulis.

DAFTAR ISI

4

ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE
Oleh; (Hilda Elawati Lasi, Desy Faulina Pakpahan, Adriana D. Silubun)

5

PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PEMANTAUAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN DI BIDANG SUNGAI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Oleh; (Enggar Trijunanto,Ignatius Ari, Samuel Kombonggey)

25

KEMAJUAN TIK, DIGITALISASI MEMBUKA JALAN BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA
Oleh; (Mubasyier Fatah (basyier.fatah@gmail.com,) Yohanes Ngamal, Eka Setiawati)

55

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) MERAUKE
Oleh: (Eka Setiawati, Juventus Bangkit Wibowo ,Carine Helda Saharia Junaidi)

72

ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) USAHA JASA PELABUHAN MERAUKE
Oleh; (Ervina Dewi, Eveline Mary, Klaudius Jipicemen)

104

PENGARUH KREDIT MACET DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN PADA BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA (KCU) MERAUKE
Oleh; (Arief Nurtjahjo,Metodius France Janggur, Salerus Kamogou)

126

"PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PEMANTAUAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN DI BIDANG SUNGAI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN MERAUKE".

[1].Enggar Trijunanto, [2] .Ignatius Ari [3] Samuel Kombonggey

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of implementing public sector accounting reporting standards and monitoring the quality of financial reports on the performance accountability of government agencies in the Bid Transportation Service. Merauke Regency River and Crossing Cruises. The participants of this research were 60 people, the selection was based on conditions determined by the researcher based on categories. The data analysis techniques used were simple linear regression analysis, multiple linear regression, validity testing, reliability and classical assumptions, and hypothesis testing, namely the T test and F test. as well as the adjusted coefficient of determination (R2).

There is a variable influence of the Implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards and Report Quality Monitoring. Finance, simultaneously (simultaneously) towards the Performance Accountability of Government Agencies, Transportation Service in the Merauke Regency River and Ferry Shipping Sector, following the formula, namely Y = 17,768 + 0.189 X1 + 0.262 X2 This effect has been tested with the F-test. The Fcount value is 128.379. It turns out that the Fcount value is greater than the Ftable value (4,709) > 3.159) with an accuracy of 95%. And together there is a big influence on the Implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards and Report Quality Monitoring. Finance, jointly (simultaneously) on the Performance Accountability of Government Agencies at the Transportation Service in the Merauke Regency River and Ferry Shipping Sector is 11.2%.

Keywords; Public sector accounting, financial reporting and accountability.

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan akuntansi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hampir semua sektor menggunakan akuntansi untuk mengelola rekening mereka secara lebih efektif dan efisien, bahkan di pemerintahan. Sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap layanan dan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat mendukung pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengatur tentang pengembangan pemerintahan daerah itu dasar hukum. otonomi Indonesia.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Dalam peranannya sistem akuntansi mendukung terciptanya penyelenggaraan keuangan daerah yang bertanggung jawab dengan menggunakan sistem desentralisasi untuk mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel (Ponamon, 2018)

Akuntabilitas publik adalah penyediaan dan pengungkapan informasi tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pemangku kepentingan. Informasi dan pengungkapan ini akan memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersedia dan mampu memberikan informasi kegiatan dan kinerja keuangan yang diperlukan dengan cara yang akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat diandalkan.

Penyediaan informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dilakukan dalam kerangka yang menghormati hak-hak masyarakat: hak atas informasi, hak untuk mempertimbangkan keinginan dan pendapatnya, hak untuk mendapat penjelasan, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Membangun tata pemerintahan yang baik memerlukan pengenalan akuntabilitas publik ke dalam rekening pemerintah. Tata kelola yang baik sering kali berarti bahwa pelaksanaan pengelolaan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga kesalahan alokasi sumber daya investasi dapat dihindari, dan bahwa korupsi dapat dihindari baik pada tingkat politik maupun administratif dapat dipahami sebagai hal yang baik pemerintah di mana pemerintah dicegah.

Disiplin fiskal telah diterapkan agar semangat reformasi dan pembangunan pemerintah baik. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan lembaga-lembaga negara memerlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan nasional yang mampu menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penerapan

prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mewujudkan tujuan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kualitas Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (KLK) (Adha et al., 2014). Penanggung jawab penyusunan laporan mutu laporan keuangan instansi pemerintah (LKLK) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengelolaan instansi pemerintah yang bersangkutan. Selain itu, pimpinan lembaga harus bertanggung jawab terhadap tim kerja dan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai (Latifah, 2017:173-187).

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan dukungan yang memadai dalam hal pengetahuan akuntansi dalam kaitannya dengan standar pelaporan keuangan instansi pemerintah. (Riantiarno dan Azlina, 2012) menekankan bahwa sistem akuntabilitas keuangan lembaga keuangan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat mekanisme pengendalian keuangan yang baik. Kehati-hatian juga harus diberikan dalam memahami sistem akuntansi, dan agar dapat memberikan informasi keuangan yang mudah dipahami kepada pengguna, pelaporan keuangan harus dilakukan oleh personel yang memahami pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini bpk wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini yang diperoleh oleh dinas perhubungan kota semarang yaitu wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP), tidak wajar (TW), dan wajar dengan pengecualian (WDP).

Opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat yang diterima oleh dinas perhubungan kota semarang tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai kemungkinan telah terjadi banyak penyimpangan anggaran. Peneliti ponamon, irene fransiska, (2018) mengatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pamungkas, bambang, (2013) juga mengatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan Andini, Dewi, dan Yusrawati, (2015) mengatakan bahwa penerapan system akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan tersebut belum memperoleh opini wtp adalah karena lemahnya pengawasan internal, penyajian yang belum sepenuhnya sesuai standar akuntansi pemerintah (sap), ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

kurang memadainya kapasitas sdm pengelola keuangan.

Kejelasan tujuan dan sasaran fiskal dalam pemerintahan juga menjadi faktor yang sangat penting. Anggaran yang jelas menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, t.t.) (2020) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan anggaran di OPD Kabupaten Kuantan Singingi berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Septiani et al., 2022) yang menemukan bahwa kejelasan anggaran dan tujuan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta dari berbagai fenomena, maka rumusan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1) Bagaimakah pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Dan Penyeberangan Kab. Merauke?
2) Bagaimakah pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Dan Penyeberangan Kab. Merauke?
3) Bagaimakah pengaruh baik Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik maupun Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Dan Penyeberangan Kab. Merauke?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

4) Untuk menganalisis apakah Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kb. Merauke.
5) Untuk menganalisis apakah Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kb. Merauke.
6) Untuk menganalisis apakah Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kb. Merauke.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Pada kajian teori akuntansi sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Namun, masih ada keraguan mengenai apakah ada teori akuntansi publik yang mapan. Faktanya, beberapa ahli meragukan bahwa sektor swasta, dimana

akuntansi berkembang lebih cepat, memiliki teori akuntansi yang lebih baik. Untuk mendukung suatu teori, perlu dilakukan berbagai penelitian yang menguji hipotesis yang ada (Pamungkas, 2012).

Pelaporan keuangan di sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam membangun akuntabilitas dalam sektor tersebut. Meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas di sektor publik telah mempengaruhi manajemen lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan informasi kepada masyarakat, informasi tersebut adalah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi keuangan bukanlah tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan disediakan untuk tujuan pengambilan keputusan saja. Akuntansi sektor publik adalah suatu alat untuk menerapkan akuntabilitas secara efektif, bukan tujuan akhir dari sektor publik itu sendiri. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1) Obyektivitas.
   Masalah umum yang muncul ketika menyiapkan laporan keuangan yang relevan adalah objektivitas. Laporan keuangan digunakan oleh manajer untuk menjelaskan kinerja selama periode tertentu.
2) Konsistensi
3) Konsistensi mengacu pada penggunaan teknik atau metode akuntansi yang sama dalam menyiapkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode berturut-turut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Karena organisasi fokus pada jangka panjang, sangat penting untuk menerapkan metode akuntansi secara konsisten. Sedangkan laporan keuangan hanya mencerminkan kinerja selama periode..
4) Daya Banding.
   Laporan keuangan sektor publik harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan lembaga lain yang sejenis. Hal ini bertujuan agar kinerja organisasi tersebut dapat dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis.
5) Tepat Waktu
   Keterbatasan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan juga berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan. Jika proses ini tidak efisien dan efektif, maka akan memakan waktu lama untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
6) Ekonomis Penyajian Laporan
   Menyusun laporan keuangan memerlukan pengeluaran dana. Semakinibanyakiinformasiiyangi dibutuhkan, semakin mahal biayanya.
7) Materialitas
   Keterbatasan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan juga berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan. Jika proses ini tidak efisien dan efektif, maka akan memakan waktu lama untuk menghasilkan

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu

2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hasna Lathifa, Haryanto(2017:1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor public adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sector swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya.

Biduri (2018:2) mendefenisikan akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

Sedangkan *menurut* Halim dan Muhammad (2018:37) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Menurut Yuestietal, (2020*)* sektor publik merupakan istilah tersendiri yang memiliki beragam defenisi, maksud dan tujuan.

Beragam defenisi yang dimiliki oleh sektor publik ini disebabkan karena luasnya wilayah publik sebagai konsekuensi yang harus dihadapi, sehingga dalam setiap disiplin ilmu yang ada memiliki cara pandang berbeda dalam memahami dan mendeskripsikan istilah sektor publik. Seperti dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik di deskripsikan sebagai kegiatan atau aktivitas operasi suatu lembaga atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang tujuannya memang dalam rangka menghasilkan sebuah produk atau jasa untuk melayani publik.

3. Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian.

4. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat, termasuk didalamnya:

1) Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; serta Lembaga dan Badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.
2) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

3) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya:
   a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain;
   b) sekolah dan universitas swasta; dan
   c) Rumah sakit milik swasta.
   d) Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

5. Indikator Akuntansi Sektor Publik.

Menurut Bastian (2017:19) membagi beberapa indikator akuntansi sektor publik yaitu terdiri dari;

1) Transaksi
   Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
2) Analisis bukti transaksi
   Setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
3) Pencatatan data transaksi,
   Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang lebih terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
4) Pengikhtisaran,
   Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.
5) Pelaporan
   Selama satu periode akuntansi transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan realibilitasnya.

6. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.

Tujuan umum dari laporan keuangan ini bertujuan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Bastian (2013:9) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh

berbagai pihak yang berkepentingan.

Sementara menurut Mahmudi (2013:143) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, social, maupun politik.Laporan keuangan pemerintah yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content). Laporan keuangan akan berguna (useful) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 2013:97).

7. Indikator Kualitas Laporan keuangan.

Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indicator (Darwanis, Saputra, & Kartini, 2016) yaitu;

a. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan; yaitu merupakan salah satu unsur prasyarat normatife pelaporan keuangan, yaitu relevan.
b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan; yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalam pengambilan keputusan.
c. Kelengkapan informasi yang disajikan; yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin, serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
d. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntansi pemerintah yang harus disajikan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas, semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi; yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.
f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan; yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya
g. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan;

yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan.

9.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mulyadi *(2015:63)* kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan *menurut Sutrisno (2015:151)* prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Presiden Republik Indonesia (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

10. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Widya. (2019:42) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut:

1) Penetapan rencana strategi, 2) Pengukuran kinerja, 3) Pelaporan kinerja, 4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

11. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengambil sumber informasi atau data yang diteliti dari peneliti sebelumnya yang menyangkut penerapan akuntansi sektor publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- Kurniawan, A. (2018), Pengaruh Efektivitas Sisten Akuntansi Keuangan daerah dan Sistem pengendalian Internal Terhadap Kualitas Akuntansi Keuangan. Sistem Pengendalian Internal Terbukti Berpengaruh Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan dengan menggunakan;Uji Multikolineritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, UjiHipotesis, Analisis Regresi Linier Berganda Uji Koefisien Determinasi (R2), Uji F -Uji T
- Veny Marlena Subaeti (2018) ; dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus: BPKD Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu) X1: Penerapan Standar Pelaporan

Akuntansi Sektor Publik X2: Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Y: Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Hipotesis, UJi F simultan , Uji KoefisienDeterminasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

12. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual penelitian yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Penelitian Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kab. Merauke.

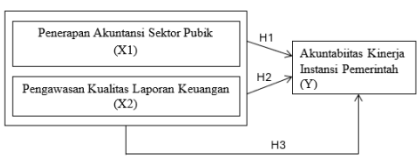

13. Hipotesa.

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (sugiyono 2016:99*).*

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori dan penelitian terdahulu pada penelitian ini penulis dapat mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1) Terdapat pengaruh antara Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara parsial.
2) Terdapat pengaruh antara variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan(X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara parsial.
3) Terdapat pengaruh antara variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) secara simultan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini **akan** dilakukan di Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Danau dan Penyeberangan Daerah Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Papua, Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Danau dan Penyeberangan Daerah Kabupaten Merauke memiliki peran penting dalam mengelola

transportasi perairan di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pentingnya penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, khususnya di sektor transportasi perairan. Penelitian akan dilaksanakan selama bulan Juli 2024. Dengan mengambil sampel sebanyak 60 orang pegawai yang ditentukan dengan kriteria yang ditentukan oleh penbeliti dari 80 populasi yang ada sebagai berikut;

Tabel Pemilihan Sampel Penelitian.

No	Indikator Kriteria Sampel	Sampel
1.	Pegawai Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Danau dan Penyeberangan Daerah Kabupaten Merauke (Populasi)	83
2.	Pegawai Honorer	(15)
3.	Pegawai yang bekerja kurang dari 3 tahun.	(8)
	Total Sampel dalam penelitian ini adalah	**60**

Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang pegawai dari total populasi 83 orang, Pemilihan sampel secara purposive diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat mewakili populasi terkait dengan fokus penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedang kan data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, maupun sumber lain yang terkait dengan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik.

Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2019:296), skala Likert adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dengan suatu pernyataan. Oleh karena itu, skala Likert memungkinkan peneliti untuk membedakan responden dalam hal bagaimana mereka berbeda satu sama lain dalam sikap mereka terhadap suatu keadaan. Setiap responden diberi nomor yang menunjukkan lebih atau kurang menguntungkan, dan netral. Dalam penelitian ini skala Likert akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Skala Likert

Nilai	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Diolah oleh peneliti (2024)

Kuesioner akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yaitu pegawai Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Danau dan Penyeberangan Daerah Kabupaten Merauke yang terlibat dalam penyusunan, pelaporan, dan pengawasan kualitas laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian menurut Sugiyono (2019:68) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menganalisis tiga variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Definisi operasional dari masing-masing variabel dan pengukurannya dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

4. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

a) ***Variable Dependent* menurut Sugiyono (2019:69)** sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. *Variable Dependent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Rahima et al., (2024) Laporan keuangan mengandung informasi penting yang memungkinkan untuk implementasi kebijakan yang akurat. Laporan keuangan harus menguntungkan semua pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dengan indikator penelitian sebagai berikut; (1) Penetapan rencana dan strategi, (2) Pengukuran kinerja, (3) Pelaporan kinerja, dan (4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan (Nasim & Oktari, 2017). Tujuan pemilihan variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk memastikan Laporan keuangan mengandung informasi penting yang memungkinkan untuk implementasi kebijakan yang akurat.

b) Variabel Independen (Variabel Bebas)

Sugiyono (2019:69) menjelaskan bahwa *variable independent* sering disebut sebagai *variable stimulus, prediktor, antecedent*. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *variable dependent* (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah penerapan standar laporan akuntansi sektor publik (X1) dan pengawas kualitas laporan keuangan (X2). Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, social, maupun politik.Laporan keuangan pemerintah yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini indikator variabel independen yang pertama yang digunakan untuk standar laporan akuntansi sektor publik (X1) adalah (1) Transaksi, (2) Analisis bukti transaksi, (3) Pencatatan data transaksi, (4) Pengikhtisaran, dan

(5) Pelaporan (Bastian 2017:19). Sedangkan indikator variabel independen yang kedua, pengawas kualitas laporan keuangan (X2) adalah (1) Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, (2) Ketepatan waktu pelaporan keuangan, (3) Kelengkapan informasi yang disajikan, (4) Penyajian secara jujur, (5) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, (6) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, dan (7) Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan (Darwis, Saputra dan Kartini, 2016)

Tabel Indikator Kuisioner Penelitian

Topik Indikator	Indikator Pertanyaan		Pertanyaan
Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Pubik (X1)	1.	Transaksi	1. Apakah organisasi Anda mencatat seluruh transaksi keuangan secara akurat dan lengkap? 2. Apakah pencatatan transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
	2.	Analisis bukti transaksi	3. Apakah analisis bukti transaksi dilakukan untuk memverifikasi keakuratan pencatatan?
	3.	Pencatatan data transaksi	4. Apakah pencatatan data transaksi didukung dengan sistem informasi yang memadai?
	4.	Pengikhtisaran	5. Apakah organisasi Anda melakukan pengikhtisaran atas seluruh transaksi keuangan secara berkala?
	5.	Pelaporan	6. Apakah organisasi Anda menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara rutin? 7. Apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku?
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	1.	Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan	8. Apakah laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat yang jelas bagi pengguna informasi? 9. Apakah informasi dalam laporan keuangan dapat mendukung

Topik Indikator	Indikator Pertanyaan		Pertanyaan
			pengambilan keputusan?
	2.	Ketepatan waktu pelaporan keuangan	10. Apakah laporan keuangan disajikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?
	3.	Kelengkapan informasi yang disajikan	11. Apakah laporan keuangan yang disajikan telah memuat informasi yang lengkap?
	4.	Penyajian secara jujur	12. Apakah laporan keuangan disajikan secara jujur dan apa adanya?
	5.	Isi laporan keuangan dapat diverifikasi	13. Apakah isi laporan keuangan dapat diverifikasi melalui bukti-bukti pendukung? 14. Apakah terdapat mekanisme verifikasi yang memadai atas isi laporan keuangan?
	6.	Isi laporan keuangan dapat dibandingkan	15. Apakah isi laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode secara konsisten?
	7.	Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan	16. Apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipahami dengan jelas?
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	1.	Penetapan rencana dan strategi	17. Apakah instansi pemerintah anda memiliki rencana strategis yang jelas dan terukur? 18. Apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi instansi?
	2.	Pengukuran kinerja	19. Apakah instansi pemerintah memiliki sistem pengukuran kinerja yang memadai? 20. Apakah indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan telah mencerminkan kinerja instansi secara keseluruhan?
	3.	Pelaporan kinerja	21. Apakah laporan kinerja yang disusun memuat informasi

Topik Indikator	Indikator Pertanyaan	Pertanyaan
		yang relevan dan akuntabel? 22. Apakah laporan kinerja tersedia dan dapat diakses oleh publik?
	4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan	23. Apakah instansi pemerintah memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang? 24. Apakah terdapat mekanisme umpan balik dan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja? 25. Apakah instansi pemerintah melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan berdasarkan informasi kinerja yang ada?

Diolah oleh peneliti (2024)

5. Uji Validitas Dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa valid atau sah suatu instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan software SPSS. Kriteria pengujian validitas menurut Ghozali, (2020) adalah:

- Jika nilai KMO-MSA (*Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*) > 0,5 dan signifikansi Bartlett's Test of Sphericity < 0,05, maka data dinyatakan layak untuk analisis faktor.
- Jika nilai factor loading > 0,5, maka item pertanyaan dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa konsisten suatu instrumen (kuesioner) dalam mengukur suatu konsep. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS. Kriteria pengujian reliabilitas menurut Ghozali, (2020: 46) adalah:

- Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,70, maka instrumen dinyatakan reliabel.
- Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,70, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

6. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2020:107) uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh

masing-masing variable independent terhadap variable dependent.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dengan analisis grafik dapat dilihat dari tampilan grafik Histogram maupun grafik P-plot (*Probability Plots*), kiriteria pengambilan keputusan dengan analisis grafik sebagai berikut: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik Histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenugi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik Histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2020:163).

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat analisis statistik dengan *Sample Kolmogorov-Smirno Test*. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan *Non-parametrik statistic* menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-V). Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu:

- Jika Sig hitung > 0,05, maka data terdistribusi secara normal
- Jika Sig hitung < 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas menururt (Ghozali, 2020:107) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*variable independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara *variable independent*. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap *variable independent* manakah yang dijelaskan oleh *variable independent* lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel menjadi *variable dependent* (variabel terikat) dan diregres terhadap *variable independent* lainnya. *Tolerance* mengukur *variable independent* yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh *variable independent* lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIP = 1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\leq$ 0.10 atau sama dengan nlai VIF $\geq$ 10.

Penelitian ini menggunakan model regresi multikolenieritas seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2020:108) yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara *variable independent* dalam model regresi.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF >10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antara *variable independent* dalam model regresi.

3) Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji *Durbin – Watson* untuk menunjukkan ada atau tidak adanya autokorelasi. Uji *Durbin – Watson* menurut Ghozali, (2020:112) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara *variable independent.* Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Durbin – Watson* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji *Durbin - Watson*

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi *positif*	Tolak	0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi *positif*	*No desicison*	dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokorelasi *negatif*	Tolak	4 – dl < d < 4
Tidak ada autokorelasi *negatif*	*No desicison*	4 – du ≤ d ≤ 4 dl
Tidak ada autokorelasi, *positif* atau *negatif*	Tidak ditolak	du < d < 4 – du

Sumber: (Ghozali, (2020:112)

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot.* Menurut Ghozali, (2020:137) Pengujian heteroskedastisitas dapat dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) apakah ada pola tertentu atau tidak. Dasar analisis grafik *scatterplot* yang dijelaskan oleh Ghozali, (2020:138) adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5) Metode Analisis Data Dan Pengujian Hipotesa

a) Analisa Regresi Linier.

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai dustribusi *probabilistic*. *Variable independent* diasumsikan memiliki nilai tetap (Ghozali, 2020:96). Adapun persamaan untuk menguji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1\,X1 + b2\,X2 + b3\,X3 + e$$

Keterangan:
Y : Pertumbuhan Laba
a : Konstanta
X1 : *Current Ratio*
X2 : *Debt to Equity Ratio*
X3 : *Net Profit Margin*
e : Koefisien *error*

b) Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/*independent* secara individual dalam menerangkan variasi *variable dependent* (Ghozali, 2020:98-99). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

- Apabila t hitung > t tabel dan nilai signifikan < α = 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variable independent berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependent.
- Apabila t hitung < t tabel dan nilai signifikan > α = 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variable

independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependent.

c) Uji F (Uji Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua *variable independent* (variabel bebas) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama secara simultan terhadap *variable dependent* (variabel terikat) (Ghozali, 2020:28). Dengan membandingkan nilai F hitung (Fh) dengan F tabel (Fh). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika F hitung > F tabel dan nilai signifikan F < a = 0,05. Maka *variable independent* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent*.

- Jika F hitung < F tabel dan nilai signifikan F > a = 0,05. Maka *variable independent* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent*.

6) Koefisien Determinasi (Uji ^{R})

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi *variable dependent*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independent* dalam menjelaskan variasi *variable dependent* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependent.* Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun wkatu (*series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2020:112) .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1) Deskripsi Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran sejumlah daftar pernyataan (kuesioner) yang diberikan kepada responden (sampel) yang telah ditentukan yaitu sebanyak 60 (enam puluh) orang yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah dutentukan oleh peneliti.

Rumusan pertanyaan yang termuat di dalam kuesioner mengacu kepada variabel penelitian, yaitu variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1), dan Kualitas Laporan keuangan (X_2) sebagai variabel bebas, dan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y) sebagai variabel terikat. Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan, maka daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan dirancang sedemikian rupa agar memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Subtansi pertanyaan disusun berdasarkan pada acuan teoritis, disesuaikan dengan dimensi dan indikator-indikator variabel bebas sebagaimana yang diuraikan dalam definisi operasional variabel, dengan maksud untuk memberikan jawaban secara objektif dan akurat.

2. Setiap pertanyaan (kuesioner) diberi nomor urut dengan lima alternatif jawaban yang tersedia bagi setiap responden.
3. Setiap butir jawaban responden dipindahkan ke dalam format skor jawaban yang memuat butir-butir pertanyaan dan skor jawaban responden, kemudian dilakukan penjumlahan skor untuk masing-masing variabel.
4. Untuk memudahkan perhitungan lebih lanjut, maka jumlah skor untuk masing-masing variabel bebas dari seluruh angket yang masuk, disusun ke dalam format rekapitulasi skor jawaban melalui proses tabulasi data.
5. Untuk memudahkan dalam proses kuantifikasi data, setiap alternatif jawaban diberi bobot berjenjang, yakni sebagai berikut, jumlah butir kuesioner sebanyak 10 (sepupuh) yang diberikan kepada 60 (enam puluh) responden, maka sudah dapat diduga bahwa rentang nilai yang diperoleh akan bergerak antara 10 sampai dengan 50.

2. Uji Validitas dan Reabilitas Data.

a). Uji Validitas Data

Tujuan pengujian validitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun adalah benar dalam mengukur gejala sehingga dapat dihasilkan data yang valid. Untuk melakukan uji validitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara skor butir-butir pertanyaan dengan skor pertanyaan secara total. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{table}$. Hasil pengujian data variabel variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil Uji validitas Variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No. Pertanyaan	rpearson variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)	rpearson Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	rpearson Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	rtabel	Keterangan validasi
1	.366**	.658**	.396**	.254	valid
2	.458**	.556**	.678**	.254	valid
3	.377**	.755**	.759**	.254	valid
4	.464**	.630**	.614**	.254	valid
5	.398**	.696**	.746**	.254	valid
6	.439**	.709**	.757**	.254	valid
7	.393**	.749**	.487**	.254	valid
8	.555**	.650**	.470**	.254	valid
9	.326**	.518**	.539**	.254	valid
10	.675**	.628**	.633**	.254	valid

Hasil pengolahan dengan IBM SPSS v.29.0 (2024)

Hasil pengujian menunjukan bahwa semua variabel penelitan (X_1, X_2 & Y) adalah valid, karena untuk ketelitian alpha 0,05 (5%) r_{tabel} = 0,254 sedangkan nilai korelasi pearson yang dihitung seperti yang disajikan pada Tabel di atas semuanya lebih besar dari 0,254.

b) Uji Reliabilitas Data

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha (α). Variabel atau konstuk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,600. Semakin nilai alpahnya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas Variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Hasil perhitungan *Cronbach Alpha* variable (X1,X2 & Y)

Variabel Penelitian	Koefisien Reliabilitas (Cronbach Alpha varible)	r tabel	N of Item	Keterangan
Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.866	0,600	10	Reliabel
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.848	0,600	10	Reliabel
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	.809	0,600	10	Reliabel

Hasil pengolahan dengan IBM SPSS. Versi 29. (2024)

Ketiga variabel penelitian di atas diatas yaitu variable Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dinyatakan reliabel, karena *cronbach's Alpha* semuanya menunjukan angka lebih besar dari 0,600. (Vivi Herlina 2019:74)

3. Asumsi Klasik

1) **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel Pengujian Normalitas Data Variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik	Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan	Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
N		60	60	60
Normal Parameters[a,b]	Mean	34.62	31.88	32.67
	Std. Deviation	4.805	5.666	5.118
Most Extreme Differences	Absolute	.119	.125	.109
	Positive	.108	.125	.082
	Negative	-.119	-.093	-.109
Test Statistic		.119	.125	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134	.120	.173

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil pengolahan dengan IBM SPSS. Versi 29. (2024)

Untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak, dapat digunakan patokan sebagai berikut :

- Jika Sig >0,05 maka data terdistribusi normal
- Jika Sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Vivi Herlina 2019:83)

Berdasarkan output SPSS tersebut besarnya koefisien Kolmogorov-Smirov untuk variabel (X1) nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0.134 dan variabel (X2) adalah 0,120 serta untuk variabel terikat (Y) adalah 0,173 ketiga variabel penelitian tersebut mempunyai ***Asymp. Sig (2-tailed)*** lebih besar dari *level of signifikan* (0,05), dengan demikian data Variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) serta variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dapat dikatakan *Normal.* Seperti yang tercantum pada tanda $_a$ dibawah Tabel 4.4 di atas yaitu ***Test distribution in Normal.***

2) **Uji Multikolineritas.**

Uji multikolinearitas merupakan hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda (Widarjono, 2010). Uji multikolinearitas ditujukan untuk melihat hubungan/korelasi antara masing-masing variabel. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk mendekati adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. *Variance inflation factor* (VIF) dan tolerance, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi, dengan ketentuan:

- Apabila nilai VIF > 10 atau tolerance < 0,10, maka dapat dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas.

- Apabila nilai VIF < 10 atau tolerance > 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel Uji Multikolinearitas Variabel bebas (X1 & X2)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik	.936	1.068
	Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan	.936	1.068

Hasil pengolahan dengan IBM SPSS. Versi 29. (2024)

Pada tabel di atas nilai tolerance yang dimiliki variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan nilai Tolerance sebesar 0,936 > 0,10, sedangkan nilai VIF pada variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan mempunyai nilai sebesar 1,068 < dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala Multikolinearitas dalam model regresi.

3) **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu penelitian ke penelitian yang lainnya. Uji Glejser digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi > α=0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Apabila nilai signifikansi < α =0.05, dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas variabel penelitian (X1 & X2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.768	5.193		3.422	.001
	Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik	.189	.135	.177	1.397	.168
	Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan	.262	.115	.291	2.292	.126

Hasil pengolahan dengan IBM SPSS. Versi 29. (2024)

Pada tabel di atas hasil pengujian Heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi variabel Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1) sebesar 0,168 > α = 0,05. Sedangkan nilai signifikansi variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X2) sebesar 0,126 > α = 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengambilan keputusan dari uji glejser tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.Pembahasan Hasil Pengujian & Hipotesa

1.Regresi Linier Dan Uji Hipotesa

a) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke. Maka digunakan analisis regresi sederhana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 29.0. Dari hasil analisis data, diperoleh nilai konstan (a_1) dan nilai koefisien regresi (b_1) masing-masing adalah 23.433 dan 0, 267 seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini

Tabel Koefisien Regresi (X_1 terhadap Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.433	4.731		4.953	.000		
	Skor Standar Pel.Ak.Sektor Publik	.267	.135	.250	1.970	.054	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data diolah dengan SPSS v.29.0 (2024)

Dengan demikian persamaan regresinya adalah, Y = 23.433 + 0, 267 X_1.

Harga-harga tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. a = 23.433 adalah bilangan konstan, artinya apabila nilai Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1), maka Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke. nilainya 23.433.
b. b_1 = 0, 267; adalah nilai koefisien regresi, artinya setiap ada kenaikan nilai Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik sebesar 1 (satu) unit, maka akan meningkatkan nilai Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke. sebesar 0, 267 unit.

Hipotesa - 1

Uji T. Pengujian Hipotesis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke

Untuk membuktikan apakah koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik tersebut cukup signifikan atau tidak dilakukan uji signifikansi melalui uji t pada taraf alpha 5%.

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ada pengaruh yang signifikan dan
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh.

  Nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan db = n-2 yaitu 58 adalah **1,672** Berdasarkan yang terlihat pada Tabel 4-7, koefisien regresi didapatkan t_{hitung} = **1.970**. Selanjutnya harga t_{hitung} ini dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. Ternyata nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} **(1.970 > 1,672),** artinya
- ***H_0 ditolak dan H_1 diterima*. (hipotesa 1 terbukti)**

Dengan demikian nilai koefisien regresi regresi Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke dengan keabsahan sebesar 95% dan alpha 5%

b) Pengaruh Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke.

Untuk mengetahui apakah ada Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke, maka digunakan analisis regresi sederhana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer software SPSS for Windows versi 29,0. Dari hasil

analisis data dengan menggunakan bantuan komputer, diperoleh nilai konstan (a_2) dan nilai koefisien regresi (b_2) masing-masing adalah 23.011 dan 0,303 seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel Koefisien Regresi (X_2 terhadap Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	23.011	3.617		6.361	.000
	Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan	.303	.112	.335	2.711	.009

a. Dependent Variable: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data diolah dengan SPSS v.29.0 (2024)

Dengan demikian persamaan regresinya adalah : Y = 23.011 + 0,303 X_2,

Harga-harga tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a_2 = 23.011 adalah bilangan konstan, artinya apabila nilai Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan diabaikan , maka Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan nilainya 23.011
- b2 = 0,303; adalah nilai koefisien regresi, artinya setiap ada kenaikan nilai Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan 1(satu) unit, maka akan meningkatkan nilai Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan 0,303 unit.

Hipotesa – 2

Uji T. Pengujian Hipotesis Variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke

Untuk membuktikan apakah koefisien regresi Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan tersebut cukup signifikan atau tidak dilakukan uji signifikansi melalui uji t pada taraf 5%.

- Jika nilai $\mathbf{t_{hitung} > t_{tabel}}$, maka ada pengaruh yang signifikan dan
- Jika nilai $\mathbf{t_{hitung} < t_{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan.

  Nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan = n-2 yaitu 58 adalah 1,672. Berdasarkan nilai koefisien regresi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4-8, nilai thitung adalah sebesar 2,711. Selanjutnya thitung ini dibandingkan dengan nilai ttabel. Ternyata nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (2.711 > 1,672) artinya:
  - **H_0 ditolak dan H_1 diterima. (hipotesis 2 terbukti)**

Dengan demikian nilai koefisien regresi Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke dengan ketelitian 95% dan alpha 5%.

c) Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik (X_1), dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y)

Untuk mengetahui adanya pengaruh Variabel X_1, dan Variabel X_2 secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y) digunakan analisis regresi berganda. Analisis

data dilakukan dengan menggunakan bantuan IBM.SPSS versi 29.0, dan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

a = 17.768

b_1 = 0,189

b_2 = 0,262

Seperti yang terlihat output SPPS, pada tabel di bawah ini :

Tabel Koefisien Regresi Ganda (X_1, dan X_2 terhadap Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.768	5.193		3.422	.001
	Skor Standar Pel.Ak.Sektor Publik	.189	.135	.177	1.397	.168
	Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan	.262	.115	.291	2.292	.026

a. Dependent Variable: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data diolah dengan program SPSS v. 29.0 (2024)

Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik (X_1), dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 17.768 + 0,189\ X_1 + 0,262\ X_2$$

Nilai konstanta dan regresi dalam persamaan regresi ganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a = 17.768; adalah bilangan konstan menunjukkan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke, dengan Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan nilainya dianggap nol
- b_1 = 0,189; adalah nilai koefisien regresi b_1, artinya setiap kenaikan/penambahan nilai Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik sebesar satu unit akan meningkatkan nilai Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke sebesar 0,189 unit.
- b_2 = 0,262; adalah nilai koefisien regresi b_2, artinya setiap kenaikan/penambahan nilai Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan sebesar satu unit akan meningkatkan nilai Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke sebesar 0,262 unit.

Hipotesa – 3

Uji F Pengujian Hipotesa Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik (X_1), dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y)

Untuk membuktikan apakah pengaruh tersebut cukup signifikan atau tidak, dilakukan uji hipotesis (uji signifikansi) melalui uji F pada taraf 5%, dengan ketentuan;

- Jika nilai $\mathbf{F_{hitung} > F_{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima,
- sebaliknya jika nilai $\mathbf{F_{hitung} < F_{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Nilai F_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan db pembilang 2 dan db

penyebut =1 (n-2-1) = 57 adalah 3,159. Kemudian dibandingkan dengan (F_{hitung}) besarnya nilai F_{hitung} dapat dilihat tabel Anova di bawah ini :

Tabel Tabel Anova Regresi Ganda

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.118	2	109.559	4.709	.013[b]
	Residual	1326.215	57	23.267		
	Total	1545.333	59			

a. Dependent Variable: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan , Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik

Data diolah dengan program SPSS v.29.0 (2024)

Dari tabel diatas, dapat didapatkan bahwa nilai F_{hitung} (4.709) lebih besar dari nilai F_{tabel} (3.159) atau (4.709) > 3,159), artinya;

- ***H_0 ditolak dan H_1 diterima.(Hipotesa -3 terbukti)***

Dengan demikian variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai Dan Penyeberangan Kabupaten Merauke.

5. Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

a) Variabel Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X_1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X_1 terhadap variabel terikat (Y) dalam bentuk persentasi (%), dengan bantuan SPSS v.29.0 besarnya koefisien determinasi untuk variabel X_1 adalah 06,3%

Tabel Koefisien Determinasi *(R.Square)* Variabel X_1 terhadap Variabel Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.250[a]	.063	.047	4.997

a. Predictors: (Constant), Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik

Data diolah dengan SPSS v.29.0 (2024)

Dari data di atas nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke sebesar 06,3%, sedang sisanya sebesar 93,7% ditentukan oleh faktor lain yang belum diketahui.

b) Variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X2 terhadap variabel terikat (Y) dalam bentuk persentasi (%), dengan bantuan SPSS v.29.0 besarnya koefisien determinasi untuk variabel X2 adalah 09,7%

Tabel Koefisien Determinasi (R.Square) Variabel X2 terhadap Variabel Y

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.335	.112	.097	4.863

The independent variable is Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan .

Data diolah dengan SPSS v.29.0 (2024)

Dari data di atas nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke

sebesar 09,7%, sedang sisanya sebesar 90.3% ditentukan oleh faktor lain yang belum diketahui.

c) Variabel Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Ak. Sektor Publik (X_1), dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke (Y)

Koefisien Determinasi untuk regresi berganda (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel (X_1) dan Variabel (X_2) terhadap variabel terikat (Y) dalam bentuk persentasi (%), untuk regresi berganda akan menggunakan R^2 yang sudah disesuaikan atau ***Adjusted R Square*** hal ini telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan beberapa variabel bebas. Dengan bantuan SPSS v.29.0 besarnya koefisien determinasi yang sudah disesuaikan ***(Adjusted R Square***) adalah sebesar 11,2%

Tabel Koefisien Determinasi yang disesuaikan (***Adjusted R.Square***) Variabel (X1), Variabel (X2) terhadap Variabel Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377[a]	.142	.112	4.824
a. Predictors: (Constant), Skor Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan , Skor.Standar Pel.Ak.Sektor Publik				

Datadiolahdengan SPSS v.29.0 (2024)

Dari data di atas nilai tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan variabel Pengawasan Kualitas Lap.Keuangan (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke sebesar 11,2%, sedang sisanya sebesar 88.8% ditentukan oleh faktor lain yang belum diketahui.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa regresi sederhana dan regresi ganda, dua faktor yang dianggap berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke yaitu Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan, secara terperinci dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh Variabel bebas Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke dengan persamaan linier $Y = 23.433 + 0,267\ X_1$. Koefisien regresi Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke telah diuji dengan uji-t, didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} **(1.970 > 1,672),** Dengan demikian nilai koefisien regresi Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke dengan

ketelitian 95% (**hipotesis 1 terbukti**).

Besar pengaruh dalam persen adalah 06,3%, sedangkan sisanya sebesar 93,7% ditentukan oleh faktor lain yang belum diketahui,

2. Terdapat pengaruh Variabel Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke, dengan persamaan linier Y = 23.011 + 0,303 X_2, Koefisien regresi Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke karena telah diuji dengan uji-t, didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} **(2.711 > 1,672)** Dengan demikian nilai koefisien regresi Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke, dengan ketelitian 95%. Besar pengaruh dalam persen adalah 09,7% sedangkan sisanya sebesar 90.3% ditentukan oleh faktor lain. (**Hipotesis 2 terbukti**).
3. Terdapat pengaruh Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan,secara bersama-sama (simultan) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke mengikuti formula yaitu Y = 17.768 + 0, 189 X_1 + 0, 262 X_2

Pengaruh ini sudah diuji dengan uji-F. Besarnya nilai F_{hitung} adalah 128,379 Ternyata nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} (4.709) > 3,159) dengan ketelitian 95 %. Dan secara bersama-sama besar pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan,secara bersama-sama (simultan) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke adalah 11,2% sisanya 88.8% disebabkan oleh faktor lain (**hipotesis 3 terbukti**).

2. Saran-saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke terutama dalam hal Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan,
2. Disebabkan karena pengaruh Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan lebih besar dibandingkan dengan pengaruh factor Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, maka kiranya pihak pimpinan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap variabel

Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan

3. Walaupun nilai pengaruh variabel bebas Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Bidang pelayaran Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Merauke dalam persen lebih besar dari pengaruh Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, dalam persen, namun jika secara bersama-sama didapatkan pengaruh yang lebih besar yaitu 11.2% Sedangkan pengaruh secara parsial untuk factor Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik saja adalah 06,3% dan pengaruh Pengawasan Kualitas Lap. Keuangan adalah 09,7% Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel bebas saling menunjang, sehingga jika dijalankan secara bersama-sama menghasilkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan kalau dilakukan secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi dan Suhardjo 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang, 3(3).

Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan kedua belas. Remaja Rosdakarya:Bandung

Ariesta, R. P, dan L, Latifah. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara. 1(2): 173-187

Bambang Pamungkas. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Volume 12, No. 1.

Bastian, Indra. (2017). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.

Bastian, Indra. (2017). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.

Biduri, Sarwenda. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Darwanis, D., Saputra, M., & Kartini, K. (2016). Effect of Professionalism, Competence, Knowledge of Financial Management, And Intensity Guidance Apparatus Inspectorate for Quality of

Financial Statements (Study on Inspectorate Regencies/Cities in Aceh). BRAND (Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution), 7(1), 28–36.

Edy, Sutrisno, (2016), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ghozali, Imam. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Halim,A dan Muhammad,S,Kusufi. 2018. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah hinggah Tempat Ibadah Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Analisis Kritis atas laporan Keuangan. Edisi Pertam Cetakan ke sepuluh. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kualitas Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (KLK) (Adha et al., 2014).

Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.

Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfbeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Ponamon, I. F. 2018, Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. Jurnal Ekonomi.

Ponamon, Irene Fransisca, (2018), "Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD pemerintah kota Manado," Jurnal Ekonomi

Riantiarno, R., dan Azlina, N. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis), 3(3).

Riduwan. (2015). Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengatur tentang pengembangan pemerintahan daerah itu dasar hukum. otonomi Indonesia.

UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1.

Widya. (2019). Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 5

Wina, I. P. H., & Khairani, S. (t.t.). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov)

JURNAL MANAJEMEN & BISNIS

ISSN 2303 – 0313

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua Selatan 10130.Tel (0971) 33333501 Email: stie@saintheresa.ac.id